

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

(Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang)

(Syaiful Munandar, BP : 1420112060, Ilmu Hukum Unand, 2016)

ABSTRAK

Saat ini banyak muncul kasus tindak pidana yang tersangkanya dilakukan oleh anak dibawah umur, mulai dari perjudian, pencurian, pencabulan, dan lain sebagainya. Anak sebagai tersangka, sepatasnya diberikan perlindungan hukum oleh negara melalui aparat penegak hukum yaitu polisi. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak dalam proses penyidikan, penyidik harus memberikan hak tersangka yang melakukan tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dimaksudkan agar hak anak tidak diintimidasi secara melawan hukum, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijalankan untuk melindungi hak dan kepentingan anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Untuk melihat mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai tersangka dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak, kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak, serta upaya mengatasi kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan. Dari hasil penelitian diketahui cara pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan sebagai tersangka di Wilayah Hukum Polresta Padang, penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) ada beberapa yang sudah dilaksanakan seperti diperlakukan secara manusiawi serta didampingi Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam ruangan penyidikan ketika dalam pemeriksaan, Kemudian ada juga hak anak yang belum dilaksanakan seperti identitas tersangka yang masih dipublikasikan ke media massa, kegiatan rekreasional yang belum dijalankan, serta adanya anak yang masih disatu ruangan penahanannya dengan tahanan dewasa. Kendala yang ditemui pihak penyidik PPA di Wilayah Hukum Polresta Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan hanya mengalami kendala yang sifatnya intern yaitu Penasehat Hukum kadang tidak selalu hadir dalam pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan tidak selalu hadir dalam pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta tempat ruangan penyidikan PPA di Wilayah Hukum Polresta Padang sangat kecil sehingga menurut penyidik identitas anak yang berkonflik dengan hukum mudah diketahui oleh orang lain. Faktor ekstern yaitu anak hanya diam saja ketika diperiksa penyidik dikarenakan trauma dan terbebani mental, pada saat pemeriksaan kadang orang tua tersangka menghardik tersangka sehingga tersangka anak tersebut merasa terpojok dan tidak mau berbicara serta pada saat penahanan terhadap tersangka anak sering menangis dan tidak mau makan. Upaya mengatasi kendala yang ditemui pihak penyidik PPA di Wilayah Hukum Polresta Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan antara lain, penyidik mengupayakan kepada Penasehat Hukum agar hadir pada setiap jadwal pemeriksaan terhadap tersangka, terhadap ruangan pemeriksaan PPA di Wilayah Hukum Polresta Padang akan mengusulkan kepada Polda Sumatera Barat untuk di ruangan Pelayanan Perempuan dan Anak ini diperbesar lagi. Saran terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, Penasehat Hukum, Penyidik mengupayakan agar hadir pada setiap jadwal pemeriksaan terhadap tersangka. serta pemerintah agar mengedepankan kepentingan perlindungan hukum terhadap hak anak sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

IMPLEMENTATION OF *LEGAL PROTECTION* OF CHILDREN'S RIGHT THAT CONFLICT WITH THE LAW ON THE LEVEL OF INVESTIGATION IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM

(A Case Study: In Jurisdiction of Polresta Padang)

(Syarif Munandar, BP : 1420112060, Faculty of Law Unand, 2016)

Many cases of criminal acts committed by underage children today, such as gambling, theft, sexual abuse, and so forth. As a suspect, children rightly given legal protection by the state through law enforcement officers namely the police. In the implementation of the legal protection of children's rights in the process of the investigation, the investigator must provide the rights of suspects who committed a criminal act in accordance with the law. The implementation of the legal protection is meant to make the rights of the children not intimidated against the law, as well as in terms of law number 11 year 2012 about the juvenile justice system can run to protect the rights and interests of children as a suspect or perpetrators. In order to see about the implementation of the legal protection of children's rights as the suspect found several problems as follows: how does the implementation of the legal protection of children's rights that conflict with the law on the level of investigation in the juvenile justice system, what problems were found by investigators in the implementation of the legal protection of children's rights that conflict with the law on the level of investigation in the juvenile justice system, and what efforts to overcome the problems found by investigators in the implementation of the legal protection of children's rights that conflict with the law on the level of investigation. From the results of research, it is known how the implementation of the legal protection of children's rights that conflict with the law on the level of investigation as a suspect in jurisdiction of Polresta Padang, related to Women and Children Service Unit investigators, there are some who have been conducted as humanely treated and accompanied by the legal advisor and society counselor in the investigation room, then there is also the right of the children who have not yet implemented such as the identity of the suspect who is still published to the news media, recreational activities that have not been run, as well as the children who are still same detention room with adult prisoners. Problems found by Women and Children Service Unit investigators in jurisdiction of Polresta Padang in the implementation of the legal protection of children's rights that conflict with the law on the level of investigation only faced internal problems. The problems are legal advisor that may not always present in the investigation of a child that conflict with the law, society counselors is not always present in the examination of a child that conflict with the law, and also the investigation room of Women and Children Service Unit in jurisdiction of Polresta Padang is very small so that according to investigators the identity of children that conflict with the law is easily known by others. Meanwhile, external factors i.e. the children just silent when investigated due to trauma and mental burden, at the time of the examination the suspect's parents sometimes rebuked a suspect so that the child felt worse and would not speak as well as at the moment of detention the child cried and would not eat. The effort of overcoming

problems found by Women and Children Service Unit investigators in jurisdiction of Padang Polresta in the implementation of the legal protection of children's rights that conflict with the law on the level of investigation, i.e. investigators sought to the legal advisor in order to be present at every investigation schedule of a suspect, while investigation room of Women and Children Service Unit in jurisdiction of Polresta Padang will propose to the West Sumatra Police to be more enlarged. Advice against the society counselors, legal counsel, investigators sought in order to be present at every investigation schedule of a suspect, and also the government should prioritize the interest legal protection of children's rights as contained in Law No. 11 Year 2012 about the juvenile justice system.

